

**PERSIAPAN PELAKSANAAN
SENSUS PERTANIAN 2003**

PERSIAPAN PELAKSANAAN SENSUS PERTANIAN 2003

1. Peranan Sektor Pertanian

Struktur perekonomian Indonesia sudah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri. Meskipun demikian, sektor pertanian masih mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Dilihat dari kontribusinya dalam pembentukan PDB pada tahun 2002, sektor ini menyumbang sekitar 17,3%, menempati posisi kedua sesudah sektor industri pengolahan. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian juga mempunyai peranan yang sangat strategis. Dari 90,8 juta penduduk yang bekerja, sekitar 44,3% nya bekerja disektor pertanian. Selain itu sektor pertanian juga berperan penting dalam penyediaan bahan baku bagi keperluan industri. Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, perlu dirancang kebijaksanaan yang tepat dan benar yang dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan up to date. Sensus Pertanian 2003 (ST03) bertujuan untuk mengumpulkan data tersebut.

2. Tujuan Sensus Pertanian

ST03 merupakan Sensus Pertanian yang ke lima yang dilakukan oleh BPS. Sensus Pertanian yang pertama dilaksanakan pada tahun 1963 dan sejak itu BPS secara rutin menyelenggarakan Sensus Pertanian setiap 10 tahun sekali, sesuai dengan amanah dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus maupun Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Karena dilakukan secara berkala setiap 10 tahun sekali, hasil Sensus Pertanian yang pertama dapat dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian yang kedua, ketiga dan seterusnya, sehingga perubahan struktur pertanian di Indonesia dapat diikuti dari waktu ke waktu.

Tujuan utama dari ST03 adalah:

- a. Mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat agar diperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia.
- b. Mendapatkan kerangka sampel (*sampling frame*) yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin.
- c. Memperoleh berbagai informasi yang tak dapat diperoleh dari survei rutin, seperti populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas dan sebagainya. Hasil ST03 juga akan digunakan sebagai angka patokan (*benchmarks*) untuk memperbaiki perkiraan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

kehutanan, peternakan dan perikanan, termasuk di dalamnya populasi pohon/ternak yang diperoleh dari survei-survei pertanian.

3. Tahapan Kegiatan ST03

ST03 merupakan kegiatan berskala besar yang memerlukan sumber daya dan dana yang besar pula. Kegiatan ST03 dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2001 dan berakhir pada tahun 2005. Kegiatan yang dilakukan dalam ST03 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2001 : - Pilot studi / uji coba di Subang, Sukabumi dan Sulawesi Selatan
- Tahun 2002 : - Pilot ST03 di Lampung dan Jawa Timur
 - Gladi Bersih ST03 di Sumatera Utara
 - Pelaksanaan Updating Sketsa Peta
 - Pencacahan Podes ST03
 - Updating Direktori Perusahaan Pertanian
- Tahun 2003 : - Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga (Listing)
 - Post Enumeration Survey (PES) ST03
 - Pengolahan hasil listing
- Tahun 2004 : - Pengolahan lanjutan dan analisis hasil listing
 - Pencacahan sampel usaha rumah tangga pertanian menurut sub sektor
 - Pengolahan awal hasil pencacahan sampel usaha rumah tangga pertanian per sub sektor
- Tahun 2005 : - Pengolahan lanjutan dan analisis hasil pencacahan sampel usaha rumah tangga pertanian per sub sektor
 - Pencacahan Survei Non Usaha Pertanian
 - Pencacahan Sensus Sampel Pendapatan Petani

4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ST Tahun 2003

- | | |
|--|---------------------|
| a. Pelatihan Teknis Ka BPS Propinsi dan Kabid di Pusat | 12 – 14 Mei 2003 |
| b. Workshop Intama | 5 – 9 Mei 2003 |
| c. Pelatihan Innas ST03 | 20 – 31 Mei 2003 |
| d. Pelatihan Inda ST03 | 16 – 30 Juni 2003 |
| e. Pelatihan petugas ST03 | 15 – 31 Juli 2003 |
| f. Pendaftaran rumah tangga | 1 – 31 Agustus 2003 |
| g. Pelatihan Innas Pengolahan | 1 – 15 Juli 2003 |

h. Pelatihan petugas pengolahan	16 – 31 Juli 2003
i. Pengolahan awal ST03-L1, ST03-L2 dan LKOC	15 Sep – 15 Okt 2003
j. Angka sementara	1 – 15 Desember 2003
k. Pengolahan rinci ST03-L2	1 Des 2003 – 30 Mar 2004
l. PES ST03	16 Sep – 15 Okt 2003

5. Metodologi Listing

- a. Listing akan dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan seperti yang tercantum pada Tabel 1. Penggolongan daerah pantai dan bukan pantai didasarkan pada data SP2000-Podes, sementara penggolongan wilayah konsentrasi dan tidak konsentrasi pertanian didasarkan pada data hasil SP2000-L2 dengan menggunakan nilai batas (*cut of point*) tertentu.

Tabel 1. Rancangan Metode Pengumpulan Data

Kategori Desa/Kelurahan	Letak Geografis	Strata Desa/Kelurahan	Metode Pengumpulan Data
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	Pantai		Sensus Lengkap
	Bukan Pantai	Konsentrasi Usaha Pertanian	Sensus Lengkap
		Tidak konsentrasi usaha Pertanian	Sensus Sampel
Pedesaan			Sensus Lengkap

- b. Blok sensus yang dilisting hanyalah blok sensus-blok sensus biasa. Blok sensus khusus dan persiapan tidak dicacah. Wilayah administrasi yang dicakup dalam ST03 adalah wilayah administrasi yang telah terbentuk sampai dengan bulan Nopember 2002. Jumlah wilayah administrasi kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, blok sensus dan rumah tangga yang dicakup dalam ST03 dapat dilihat pada lampiran 1.
- c. Metode pemilihan blok sensus di perkotaan daerah bukan pantai strata tidak konsentrasi pertanian adalah metode pemilihan sampel satu tahap, yaitu memilih

sejumlah blok sensus dengan sistematik sampling. Daftar sampel blok sensus akan dimuat dalam daftar ST03-DSBS yang akan dikirimkan kedaerah pada bulan Mei 2003.

6. Petugas

Petugas yang terlibat dalam ST03 adalah:

- a. Instruktur Nasional (Innas).
- b. Instruktur Daerah (Inda).
- c. Koordinator Sensus Kecamatan (KSK).
- d. Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan (PKSK).
- e. Pengawas/Pemeriksa Sensus Pertanian 2003 (PML).
- f. Pencacah Sensus Pertanian 2003 (PCL).

Pelatihan petugas ST03 akan diintegrasikan dengan pelatihan survei garam yodium. Jumlah kebutuhan petugas per propinsi dapat dilihat di Lampiran 2.

7. Jenis Dokumen yang digunakan dalam Listing

Jenis dokumen yang digunakan adalah:

a. Buku Pedoman

- 1) Buku Pedoman Teknis BPS Propinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Buku Pedoman Instruktur Nasional
- 3) Buku Pedoman Instruktur Daerah/KSK
- 4) Buku Pedoman Pengawas/Pemeriksa Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga
- 5) Buku Pedoman Pencacah Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga

b. Daftar ST03

- 1) Daftar ST03-L1, adalah daftar yang digunakan untuk mendaftar bangunan dan rumah tangga dalam satu blok sensus
- 2) Daftar ST03-L2, adalah daftar yang digunakan untuk mencacah rumah tangga baik yang mempunyai usaha pertanian maupun tidak. Satu set Daftar ST03-L2 digunakan untuk mencacah satu rumah tangga.
- 3) Daftar ST03-KBL2, adalah daftar yang digunakan untuk kontrol blok yaitu dengan menyalin keterangan dalam Daftar ST03-L1 Blok I dan II. Satu daftar digunakan untuk satu blok sensus.

- 4) Daftar ST03-LKOC, adalah daftar yang digunakan untuk merekap isian Daftar ST03-L2. Satu daftar digunakan untuk satu blok sensus.
- 5) Blanko ST03-SWB, adalah blanko yang digunakan untuk menggambar sketsa peta blok sensus
- 6) Daftar Kode Tanaman, Ternak dan Unggas.
- 7) Stiker ST03. Stiker ini hanya ditempel pada bangunan yang *belum* mempunyai stiker P4B. Kegunaannya untuk mengidentifikasi bangunan sensus yang telah dikunjungi petugas ST03.

8. Pengolahan Dokumen Listing

- a. Hasil pengolahan listing ST03 akan dipublikasikan dalam 2 versi: angka sementara dan angka final. Angka sementara diperoleh dari hasil pengolahan Daftar ST03-LKOC, sedangkan angka final diperoleh dari hasil pengolahan Daftar ST03-L2 dan ST03-KBL2.
- b. Daftar ST03-LKOC diolah dengan data entry yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten/Kota. Hasil pengolahan angka sementara ini akan dipublikasikan awal Desember 2003 sebagai laporan kepada Presiden.
- c. Pengolahan Daftar ST03-L2 dan ST03-KBL2 dilakukan dengan scanner di pusat-pusat pengolahan yang sudah ditentukan, sementara untuk kegiatan pra komputer (editing-coding) akan dilakukan di BPS Kabupaten/Kota. Hasil pengolahan diharapkan selesai pada akhir Maret 2004.
- d. Untuk kelancaran pengolahan dokumen listing, disusun 4 buku pedoman:
 - Sistim Pengolahan Daftar ST03-LKOC.
 - Pedoman Editing-Coding Daftar ST03-L2, ST03-KBL2 dan ST03-LKOC.
 - Pedoman pengoperasian program pengolahan Daftar ST03-L2 dan ST03-KBL2.
 - Sistim pengolahan Daftar ST03-L2 dan ST03-KBL2.

9. Penerangan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ST03 di lapangan, semua jajaran BPS di daerah perlu melakukan berbagai kegiatan penerangan kepada masyarakat. Semua kegiatan penerangan tersebut ditujukan dan diarahkan untuk:

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang rencana pelaksanaan sensus pertanian yang akan dilakukan oleh BPS sebagaimana diatur dalam PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

- 2) Memberikan pemahaman yang benar tentang arti dan kegunaan ST03 sehingga para responden dengan suka rela akan memberikan keterangan yang obyektif dan apa adanya.

Dengan memperhatikan sasaran kegiatan penerangan tersebut, maka bentuk dan jenis media penerangan yang akan digunakan harus mampu menjangkau lapisan masyarakat yang luas. Bahan penerangan yang telah disiapkan oleh BPS antara lain:

- 1) Stiker ST03

Stiker merupakan alat yang dipergunakan dalam sosialisasi ST03. Mekanisme sosialisasi adalah (i) dilakukan penempelan stiker pada kendaraan operasional BPS di Pusat dan Daerah baik roda dua maupun empat; (ii) penempelan di kendaraan umum; (iii) tempat umum; dan (iv) himbauan penempelan pada kendaraan pribadi.

- 2) Pembuatan leaflet ST03

Leaflet adalah sarana informasi bagi pimpinan perusahaan pertanian (Updating Direktori Perusahaan), rumah tangga pertanian, instansi terkait, nara sumber, akademis, pakar, dan masyarakat. Leaflet berukuran quarto (21,5 x 29,5 cm) dicetak berwarna (*full color*).

- 3) Pembuatan poster ST03

Poster merupakan sarana informasi yang dipasang pada tempat umum atau balai desa, dengan cakupan wilayah di seluruh desa di Indonesia. Poster berukuran seperempat plano dicetak berwarna (*full color*).

- 4) Pembuatan spanduk ST03

Spanduk dibuat dengan ukuran besar (10 x 10 meter) dan dipasang di BPS gedung 6, Pusdiklat BPS, dan STIS. Sedangkan setiap BPS Propinsi/Kabupaten/Kota disarankan membuat spanduk dan dipasang di Kantor BPS dan tempat umum.

- 5) Pembuatan radio spot ST03

Radio spot berisi lagu Sensus Pertanian yang diselingi narasi himbauan untuk responden agar ikut mensukseskan kegiatan ST03. Radio spot ini akan diperdengarkan melalui media RRI (nasional dan regional) dan radio-radio swasta pilihan.

- 6) Pembuatan majalah udara

Majalah udara merupakan sebuah feature yang disiarkan melalui media elektronik radio. Seperti radio spot, majalah udara ini akan didengarkan melalui media RRI (nasional dan regional) dan radio-radio swasta pilihan.

7) Pembuatan sandiwara udara

Sandiwara udara merupakan sarana sosialisasi melalui media radio. Sandiwara dibuat berdasarkan cerita yang khas dan dibuat dengan berbagai bahasa daerah.

8) Pembuatan TV commercial (filler)

Filler ST03 merupakan perangkat sosialisasi berupa iklan dengan durasi 30 detik dan 60 detik melalui media televisi.

9) Pembuatan talk show

Sebuah acara televisi/radio yang berisi suatu dialog para pakar mengenai ST03. Penayangan talk show menggunakan media televisi terutama TVRI atau televisi swasta lainnya.

10) Diskusi interaktif

Sebuah acara televisi/radio yang berupa dialog dan tanya jawab secara langsung dan interaktif.

11) Wawancara

Dialog khusus tentang ST03 baik melalui media TV atau media radio. Biasanya pada waktu selang dari waktu tayang/siar acara warta berita.

12) Kuis interaktif

Suatu acara pada media TV/radio yang bersifat hiburan yang berupa nyanyian dan kuis. Isi materi merupakan sosialisasi ST03, dimana pertanyaan yang diajukan tentang ST03.

10. Permasalahan untuk bahan diskusi

- a. Kemungkinan masih ada perbedaan antara jumlah wilayah administrasi (kabupaten/kota, kecamatan, desa dan blok sensus) yang dicakup dalam ST03 dengan keadaan di lapangan, sehingga akan mempengaruhi biaya.
- b. Penentuan daerah perkotaan dan pedesaan, maupun daerah pantai dan bukan pantai strata konsentrasi dan tidak konsentrasi usaha pertanian dilakukan oleh BPS Pusat dengan menggunakan data hasil SP2000-L2 dan SP2000-Podes. Pengklasifikasian ini kemungkinan berbeda dengan keadaan di daerah. Kalau perbedaan ini terjadi pada daerah perkotaan bukan pantai, perlu dicarikan alternatif pemecahannya karena strata konsentrasi akan di sensus lengkap, sementara strata tidak konsentrasi disensus sampel sehingga perbedaan pengklasifikasian akan berpengaruh terhadap besaran biaya.

- c. Pelatihan petugas ST03 diintegrasikan dengan pelatihan petugas garam yodium. Karena sumber pembiayaannya berbeda, BPS daerah harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan administrasinya.
- d. Kegiatan pengolahan dokumen ST03-L2 dan ST03-KBL2 kemungkinan besar akan overlap dengan kegiatan pengolahan P4B. Untuk itu BPS Daerah harus melakukan rencana pengolahan seteliti mungkin dengan memperhitungkan mesin scanner dan SDM yang ada.
- e. Dalam rangka penerangan ST03, BPS Pusat akan membuat pedoman umum yang dapat dijadikan acuan oleh BPS Daerah untuk menyebar-luaskan informasi tentang ST03. Pedoman umum tersebut, misalnya menyangkut rencana penayangan filler (kapan dan distasiun TV mana saja), pemasangan poster dan spanduk, penyebaran leaflet maupun sticker. Dengan demikian BPS Daerah dapat membuat rencana penerangan ST03 secara lebih teliti.

Lampiran 1

Banyaknya wilayah administrasi yang dicakup dalam ST03

Propinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Desa	BlokSensus	RumahTangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NAD	16	4	203	5 771	8 651	814 100
12. Sumatera Utara	13	7	326	5 349	19 220	2 097 500
13. Sumatera Barat	9	7	144	2 086	9 151	898 000
14. Riau	12	4	150	1 622	8 486	1 060 100
15. Jambi	9	1	71	1 192	4 991	543 700
16. Sumatera Selatan	7	4	143	2 699	11 749	1 277 800
17. Bengkulu	3	1	59	1 161	2 861	344 900
18. Lampung	8	2	162	2 140	13 409	1 569 900
19. Bangka Belitung	2	1	36	317	1 765	200 900
31. DKI Jakarta	1	5	44	267	5 496	730 200
32. Jawa Barat	16	9	545	5 761	57 765	7 037 900
33. Jawa Tengah	29	6	560	8 556	60 434	6 489 800
34. DI Yogyakarta	4	1	78	438	5 840	641 200
35. Jawa Timur	29	9	641	8 497	71 018	7 694 000
36. Banten	4	2	122	1 479	11 384	1 416 400
51. Bali	8	1	53	686	6 056	634 900
52. Nusa Tenggara Barat	6	2	94	737	7 667	915 600
53. Nusa Tenggara Timur	14	1	171	2 550	7 391	796 100
61. Kalimantan Barat	8	2	137	1 751	7 472	849 300
62. Kalimantan Tengah	13	1	85	1 324	3 994	452 300
63. Kalimantan Selatan	9	2	119	1 946	6 487	655 800
64. Kalimantan Timur	9	4	109	1 300	5 306	495 800
71. Sulawesi Utara	4	2	94	1 206	4 333	497 600
72. Sulawesi Tengah	8	1	76	1 440	4 448	528 900
73. Sulawesi Selatan	23	3	285	3 072	14 966	1 651 300
74. Sulawesi Tenggara	4	2	90	1 564	3 601	439 200
75. Gorontalo	2	1	32	377	1 636	206 700
81. Maluku	4	1	52	851	2 654	246 700
82. Maluku Utara	2	1	45	743	1 828	143 300
83. Papua	12	2	194	3 578	5 703	553 100
Jumlah	288	89	4920	70 460	375 762	41 883 000

Lampiran 2

Jumlah kebutuhan petugas ST03 per propinsi

Propinsi	Jumlah Blok Sensus			Jumlah Petugas ST03				Jumlah Kelas (@ 25 org Petugas)	Jumlah Inda (@ 2 Kls)	Innas	
	Kota	Desa	Jumlah	PCL (@ 3 BS)	PML (@ 4 PCL)	PKSK (@ 5 PML)	Jumlah			Kls Inda (@25 org)	Jumlah Innas (@2Kls)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11. NAD	704	7,947	8,651	2,884	721	203	3,808	203	203	8	4
12. Sumatera Utara	4,577	14,643	19,220	6,407	1,602	326	8,335	326	326	13	7
13. Sumatera Barat	1,467	7,684	9,151	3,051	732	153	3,936	153	144	6	3
14. Riau	2,491	5,995	8,486	2,829	708	150	3,687	150	150	6	3
15. Jambi	684	4,307	4,991	1,664	416	84	2,164	83	71	3	2
16. Sumatera Selatan	1,775	9,974	11,749	3,917	980	196	5,093	196	143	6	3
17. Bengkulu	525	2,336	2,861	954	239	59	1,252	59	59	2	1
18. Lampung	1,639	11,770	13,409	4,470	1,118	224	5,812	224	162	6	3
19. Bangka Belitung	590	1,175	1,765	589	148	36	773	36	36	1	1
31. DKI Jakarta	5,496	-	5,496	1,832	458	92	2,382	92	46	2	1
32. Jawa Barat	16,664	41,101	57,765	19,255	4,814	963	25,032	963	545	22	11
33. Jawa Tengah	14,498	45,936	60,434	20,145	5,037	1,008	26,190	1,007	560	22	11
34. DI Yogyakarta	2,327	3,513	5,840	1,947	487	98	2,532	97	78	3	2
35. Jawa Timur	17,080	53,938	71,018	23,673	5,919	1,184	30,776	1,184	641	26	13
36. Banten	3,606	7,778	11,384	3,795	949	190	4,934	190	122	5	3
51. Bali	2,133	3,923	6,056	2,019	505	101	2,625	101	53	2	1
52. Nusa Tenggara Barat	1,823	5,844	7,667	2,556	639	128	3,323	128	94	4	2
53. Nusa Tenggara Timur	652	6,739	7,391	2,464	616	171	3,251	171	171	7	4
61. Kalimantan Barat	951	6,521	7,472	2,491	623	137	3,251	137	137	5	3
62. Kalimantan Tengah	550	3,444	3,994	1,332	333	85	1,750	85	85	3	2
63. Kalimantan Selatan	1,132	5,355	6,487	2,163	541	119	2,823	119	119	5	3
64. Kalimantan Timur	2,108	3,198	5,306	1,769	443	109	2,321	109	109	4	2
71. Sulawesi Utara	1,155	3,178	4,333	1,445	362	94	1,901	94	94	4	2
72. Sulawesi Tengah	644	3,804	4,448	1,483	371	76	1,930	76	76	3	2
73. Sulawesi Selatan	2,503	12,463	14,966	4,989	1,248	285	6,522	285	285	11	6
74. Sulawesi Tenggara	549	3,052	3,601	1,201	301	90	1,592	90	90	4	2
75. Gorontalo	263	1,373	1,636	546	137	32	715	32	32	1	1
81. Maluku	562	2,092	2,654	885	222	52	1,159	52	52	2	1
82. Maluku Utara	315	1,513	1,828	610	153	45	808	45	45	2	1
83. Papua	1,057	4,646	5,703	1,901	476	194	2,571	194	194	8	4
Jumlah	90,520	285,242	375,762	125,266	31,298	6,684	163,248	6,681	4,922	196	104

Catatan : Kol (7), (9) dan (10) = Minimal Sejumlah Kecamatan

STATISTIK PERTANIAN RUTIN

I. STATISTIK TANAMAN PANGAN

1.1. Latar Belakang

Data produksi padi dan palawija yang diterbitkan setiap empat bulan sekali (sub round) oleh BPS, baik angka tetap, angka sementara maupun angka ramalan/perkiraan produksi merupakan sumber informasi penting untuk kebijakan pemerintah terutama dalam kaitannya dengan persediaan/perkiraan kebutuhan pangan. Dalam rangka meningkatkan akurasi data serta ketepatan waktu penyajian, Subdit Statistik Tanaman Pangan melakukan pendelegasian pengolahan ke BPS propinsi. Desentralisasi pengolahan di daerah juga memungkinkan BPS untuk lebih meningkatkan perencanaan dan pengembangan statistik tanaman pangan.

1.2. Pendelegasian pengolahan

Adanya pendelegasian pengolahan angka produksi padi dan palawija ke BPS Propinsi, diharapkan dapat mengurangi permasalahan klasik yang selama ini selalu ada yaitu keterlambatan pengiriman dokumen dan perbedaan angka hasil pengolahan daerah dengan pusat.

a. Hasil pengolahan BPS Propinsi dapat digunakan bila memenuhi ketentuan berikut:

- Angka luas panen yang digunakan adalah angka hasil pengolahan daerah dengan Program SIMPP, sesuai dengan yang dikirimkan ke pusat.
- Pengiriman raw data ke pusat dilakukan secara berkala setiap akhir bulan.
- Pada saat penghitungan ramalan dipusat, pengiriman raw data paling lambat 10 hari sebelumnya dan raw data harus sudah lengkap (SP-IA/IB, Ubinan, SP-IV, dan SP-VA) dengan estimasi untuk dokumen tidak masuk (SP-IA/IB dan SP-VA).
- Series data dan metode ramalan yang digunakan di BPS propinsi adalah yang dikirim dari BPS Pusat. Sebelum melakukan ramalan, series data harus selalu diperbaharui sesuai kondisi terakhir.
- BPS Propinsi diharapkan dapat memberikan penjelasan pada formulir ramalan penyebab terjadinya kenaikan/penurunan angka sesuai dengan kebijakan/program pertanian atau kondisi yang ada di daerah, misalnya banjir, kekeringan, penundaan tanam atau alih komoditi dll.

b. Permasalahan pengolahan daerah yang selama ini selalu terjadi:

- Beberapa propinsi tidak mengirimkan hasil pengolahan (raw data) SIMPP, atau data dikirim dalam bentuk lain (mis. Excel).
- Pengiriman data tidak lengkap terutama hasil entry dokumen SP IV, SP VA dan Daftar II.
- Angka pada formulir ramalan tidak sama dengan raw data pada SIMPP.
- Pengiriman raw data ke pusat bersamaan dengan formulir ramalan dan dilakukan 1 atau 2 hari menjelang pembahasan di pusat (terlalu mendesak).
- Naik dan turunnya angka yang sangat besar tidak disertai penjelasan penyebabnya.

1.3. Raker Pembahasan Angka Ramalan Produksi Padi dan Palawija

Raker ramalan dilaksanakan oleh Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

- BPS propinsi tidak semuanya diundang, tetapi tergantung urgensi dan ketersediaan dananya.
- Sebelum raker Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan biasanya menurunkan tim statistik ke propinsi untukantisipasi kelengkapan laporan yang akan berakibat pada angka ramalan
- Permasalahan daerah yang ada harus dipecahkan sesuai kondisi lapangan dan koreksi harus dilakukan pada raw data SIMPP. Koreksi tidak dibenarkan hanya pada formulir ramalan.
- Diharapkan setelah raker ramalan selesai, angka sudah tidak perlu dilakukan perubahan lagi.

1.4. Lain-lain

Pada pembahasan Ramalan III, BPS Propinsi harus membawa/mengirimkan angka tetap produksi padi dan palawija per kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar tersedia database yang lengkap dan berkesinambungan.

- Penetapan Angka Tetap direncanakan akan dimajukan menjadi bulan April.
- Diusulkan untuk mengganti subround dengan triwulanan, karena di Deptan sendiri periode tanam/panen merupakan periode tiga bulanan yaitu MH-1, MH-2, MK-1 dan MK-2, tetapi masalahnya, sample ubinan relative kecil untuk estimasi triwulanan.

- Untuk Propinsi yang sudah melaksanakan refreshing (9 Propinsi) pengisian daftar I (listing ubinan) harus lebih baik. Data ini akan digunakan sebagai dasar uji coba penghitungan luas panen dengan pendekatan rumah tangga (metoda alternative).
- Karena daftar SP I s/d V yang baru sudah diberlakukan, untuk propinsi yang belum refreshing, akan difikirkan pengadaan buku pedomannya.

II. STATISTIK HORTIKULTURA

2.1. Survei Pertanian

a. Daftar SP II dan SP III

Pada tahun 2002, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian telah melakukan penyempurnaan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data statistik hortikultura (daftar SP II dan SP III). Penyempurnaan daftar ini diikuti dengan penyegaran (refreshing) terhadap petugas pengumpul data yaitu KCD/Mantri Tani (Mantan) dan KSK/Mantri Statistik (Mantis) di 9 (sembilan) propinsi. Sebagai kelanjutan dari refreshing tahun 2002, pada tahun 2003 direncanakan akan diadakan kembali refreshing di 6 (enam) propinsi yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bali, NTB dan Kalimantan Barat. Sama seperti tahun lalu, penyandang dana refreshing adalah Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin) Departemen Pertanian dan Diperta propinsi. Pelaksanaan penggunaan daftar SP II dan SP III yang disempurnakan telah dimulai sejak bulan Januari 2003.

b. Pengolahan daftar SP II dan SP III daftar lama

Pengolahan daftar SP II dan SP III dengan menggunakan komputer dimulai pada tahun 1995. Sosialisasi program pengolahan dan pengiriman program ke daerah telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat rekonsiliasi Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 1998 dan Rapat Teknis (Ratek) tahun 2002. Dari sosialisasi ini diharapkan daerah akan mencoba program pengolahan, sehingga sedikit demi sedikit pengolahan dapat dialihkan dari pusat ke daerah.

BPS Propinsi yang telah melakukan pengolahan dengan komputer dan mengirimkan soft copy melalui e-mail ke Subdit Statistik Hortikultura antara lain adalah propinsi Sulawesi Selatan (SP-IIIA dan SP-IIIB, triwulan I dan II tahun 2002), serta propinsi Riau (SP-IIA dan SP-IIIA tahun 2002).

c. Pengolahan daftar SP II dan SP III daftar baru

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa daftar SP II dan SP III yang disempurnakan (daftar baru), digunakan pada tahun 2003. Dengan adanya perubahan pada daftar SP II dan SP III, maka program pengolahannya perlu disesuaikan. Saat ini sedang disusun program pengolahan sesuai dengan perubahan yang ada dengan menggunakan software Foxpro 2.50 under Dos dan Visual Foxpro. Program yang dibuat dengan software Foxpro 2.50

under Dos akan dihentikan penggunaannya bila program dengan software Visual Foxpro sudah siap.

- 1) Kekurangan dan kelebihan software Foxpro2.50 under Dos antara lain :
 - (a) Software Foxpro2.50 under Dos sudah dipahami oleh programmer, sehingga program cepat selesai. Dengan demikian kesinambungan pengolahan data SP II dan SP III tidak terganggu.
 - (b) Jumlah digit setiap baris terbatas. dengan adanya tambahan kolom harga, maka banyaknya digit setiap kolom harus disesuaikan. Hal ini menyebabkan tampilan layar di komputer tidak sesuai dengan kuesioner SP II dan SP III yang sebenarnya.
- 2) Kekurangan dan kelebihan software Visual Foxpro antara lain :
 - (a) Merupakan software yang baru, sehingga belum dipahami programmer, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan program pengolahan SP II dan III.
 - (b) Jumlah digit setiap baris lebih banyak. dengan adanya tambahan kolom harga, tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya digit setiap kolom. Diharapkan tampilan layar di komputer sama dengan kuesioner SP II dan SP III yang sebenarnya.

2.2. Survei Tahunan Perusahaan Hortikultura

Daftar nama dan alamat yang digunakan untuk Survei Perusahaan Hortikultura tahun 2003 adalah daftar nama dan alamat perusahaan berdasarkan hasil up dating Direktori Perusahaan Pertanian Sensus Pertanian 2003 (DPP-ST03) yang dilaksanakan pada tahun 2002 dan Survei Perusahaan Hortikultura tahun 2002.

Dalam publikasi perusahaan hortikultura tahun 2002, hanya ditampilkan daftar nama dan alamat saja. Hal ini terjadi karena daftar yang kembali ke BPS sangat sedikit dan isinya tidak lengkap, sehingga informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk diolah. Dengan digunakannya direktori hasil DPP-ST03, diharapkan perusahaan hortikultura yang di survei betul-betul ada dan ditemukan di lapangan, sehingga daftar yang kembali ke BPS akan meningkat dan diisi lengkap, dengan demikian diharapkan publikasi perusahaan hortikultura tahun 2003 menjadi lebih lengkap.

III. STATISTIK PETERNAKAN DAN PERIKANAN

3.1. Pendahuluan

Pengumpulan data peternakan dan perikanan dilakukan melalui pencacahan langsung terhadap seluruh perusahaan peternakan/perikanan dan RPH/TPI di Indonesia :

- a. Laporan **tahunan** mencakup perusahaan peternakan sapi perah, ternak besar/kecil, unggas, budidaya ikan, dan penangkapan ikan; di samping Kantor Pusat Perusahaan Perikanan dan Perusahaan Pelelangan Ikan. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah tenaga kerja, jumlah populasi, produksi, pengeluaran dan pendapatan, dan mutasi ternak.
- b. Laporan **triwulanan** mencakup RPH, Keurmaster, dan TPI. Data dari RPH/Keurmaster mencakup jumlah ternak yang dipotong, rata-rata berat hidup, rata-rata berat karkas dan rata-rata berat jeroan. Data TPI mencakup kuantitas ikan per jenis yang dijual dan perahu/kapal yang mendarat.

Masalah mendasar yang dihadapi adalah kelambatan pemasukan dokumen dari daerah, kurang - lengkap/kejanggalan isian, perbedaan angka antara BPS dan Ditjen Peternakan, dan cakupan data yang terbatas.

3.2. Pengumpulan Data

a. Data Tahunan Perusahaan Peternakan dan Perikanan

Pengumpulan data perusahaan setiap tahun dilakukan pada seluruh perusahaan peternakan/perikanan yang masih aktif/melakukan kegiatan pada tahun bersangkutan, dengan cara kunjungan langsung oleh petugas (staf/mantis), yang seyogyanya sambil menjelaskan kepada responden hal-hal yang berkaitan dengan pengisian kuesioner.

b. Data Triwulanan RPH & TPI

Pengumpulan data pemotongan ternak dilakukan terhadap seluruh RPH dan Keurmaster, sedangkan produksi ikan laut yang terjual per bulan diperoleh dari TPI. Cara pencacahan sama dengan data tahunan, dengan isian yang sangat sederhana.

c. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan tahun 2003

Tabel 1
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Statistik Peternakan dan Perikanan
Tahun 2003

Waktu Rujukan	Pencacahan Lapangan	Penerimaan Dokumen di Pusat	Pengolahan Dokumen di Pusat	Publikasi di Pusat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TAHUNAN				
Jan-Des'02	Jan – Juni '03	April – Okt '03	Juni- Des '03	Des '03
TRIWULANAN				
Jan – Maret	April '03	Mei – Juni '03	Mei – Juli '03	Juli '03
April – Juni	Juli '03	Ags – Sept '03	Ags – Okt '03	Okt '03
Juli – Sept	Oktober '03	Nov – Des '03	Nov – Jan '03	Januari '03
Okt – Des	Januari '04	Feb – Maret '04	Feb – April '04	April '04

d. Permasalahan dan Pemecahan

1). Permasalahan

- (a). Penerimaan dokumen hasil pecacahan dari sebagian besar propinsi mengalami keterlambatan, bahkan ada hasil pencacahan triwulanan dikirimkan dua triwulan sekaligus.
- (b). Adanya perbedaan jumlah dokumen dalam lembar pengiriman BPS Propinsi dengan jumlah dokumen yang diterima BPS Pusat.
- (c). Keurmaster dianggap identik dengan pencatat pemotongan ternak di desa, sehingga jumlah keurmaster lebih besar dari jumlah kecamatan. Seharusnya wilayah kerja seorang Keurmaster mencakup satu kecamatan atau lebih.
- (d). Satu TPI mempunyai nama lebih dari satu, padahal alamatnya sama.
- (e). Kuantitas ikan yang dilelang dalam TPI triwulanan tidak sama dengan laporan tahunan (LTPI).

IV. STATISTIK PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

4.1. Pendahuluan

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Subdirektorat Statistik Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan Statistik Perkebunan dan Kehutanan.

Subdirektorat Statistik Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1). Seksi Penyiapan Kegiatan Statistik Perkebunan dan Kehutanan.
- 2). Seksi Pengolahan Statistik Perkebunan dan Kehutanan.
- 3). Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Perkebunan dan Kehutanan.

b. Cakupan Kegiatan

Kegiatan Statistik Perkebunan dan Kehutanan, meliputi :

1). Survei Perusahaan Perkebunan

Berdasarkan frekuensi pengumpulan datanya, Survei Perusahaan Perkebunan terdiri atas Survei Perkebunan Bulanan dan Survei Perkebunan Tahunan.

1. Survei Perusahaan Perkebunan Bulanan

Survei ini dilakukan dengan pendekatan komoditi yang mencakup 9 (sembilan) jenis komoditi yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kopi, teh, tebu, tembakau, kina dan serat. Sebagai unit pencacahan adalah administratur kebun sesuai dengan komoditi yang diusahakan. Informasi yang dicakup terbatas pada indikator-indikator pokok yaitu luas areal, produksi dan persediaan (stock). Pencacahan dilakukan dengan cara *mailing system*.

(b). Survei Perusahaan Perkebunan Tahunan

Survei ini juga dilakukan dengan pendekatan komoditi yang mencakup 5 (lima) jenis komoditi yaitu kelapa sawit, teh, kakao, kopi dan kina. Sebagai unit pencacahan adalah administratur kebun sesuai dengan komoditi yang diusahakan. Informasi yang dicakup lebih rinci karena dimaksudkan untuk memperoleh data struktur ongkos komoditi perusahaan perkebunan. Informasi tersebut meliputi luas areal, mutasi tanaman, produksi, pemakaian pupuk dan pestisida, banyaknya tenaga kerja dan upah/gaji, serta input output perusahaan perkebunan. Pencacahan dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan atau staf BPS Kabupaten/Kota.

2). Survei Industri Karet Remah.

Unit pencacahan survei ini adalah usaha industri karet remah, usaha industri rumah asap serta usaha industri remilling. Informasi yang dicakup meliputi pembelian, pemakaian dan stok bahan baku, produksi : penjualan dan stok produksi serta banyak dan nilai penjualan produksi. Pencacahan dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan atau staf BPS Kabupaten/Kota dengan frekuensi pengumpulan data secara bulanan.

ii. Survei Perusahaan Kehutanan.

Survei ini meliputi Survei Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Survei Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) serta Survei Perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar (STL). Informasi yang dicakup meliputi produksi, mutasi tanaman, banyaknya tenaga kerja dan upah/gaji serta input output Perusahaan Kehutanan . Pencacahan dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan atau staf BPS Kabupaten/Kota dengan frekuensi pengumpulan data secara tahunan.

4.2. Evaluasi Kegiatan Tahun 2002**a. Tingkat pemasukan dokumen.**

Pada tahun 2002 dokumen yang digunakan untuk survei perusahaan perkebunan, kehutanan dan industri karet remah meliputi PB2001-Kelapa sawit, PB2001-Teh, LTHPH1-2001, LTHPH2-2001, LTHTI-2001, LTSLWA-2001 dan CR/R/RA-2002. Sampai dengan tanggal 15 Maret 2003 tingkat pemasukan dokumen tersebut masih rendah. Banyaknya pemasukan dokumen untuk masing-masing Propinsi dapat dilihat pada lampiran 1.

KUMPULAN SLIDE

Persiapan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2003

Bahan Ratek, 12-14 Mei 2003

1. Peranan Sektor Pertanian

- ♦ Struktur perekonomian Indonesia sudah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri
- ♦ Pada tahun 2002 sektor pertanian menyumbang 17,3% dalam pembentukan PDB, menempati posisi kedua sesudah sektor industri pengolahan
- ♦ Dari 90,8 juta penduduk yang bekerja, sekitar 44,3% nya bekerja disektor pertanian
- ♦ Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perlu dirancang kebijaksanaan yang tepat yang harus dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan up to date. Sensus Pertanian 2003 (ST03) bertujuan untuk mengumpulkan data tersebut

2. Tujuan Sensus Pertanian

- ♦ Mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat agar diperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia.
- ♦ Mendapatkan kerangka sampel (*sampling frame*) yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin.
- ♦ Memperoleh berbagai informasi yang tak dapat diperoleh dari survei rutin, seperti populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani gurem, distribusi penguasaan dan penggunaan lahan dan sebagainya. Hasil ST03 juga akan digunakan sebagai angka patokan (*benchmarks*) untuk memperbaiki perkiraan produksi pertanian.

3. Tahapan Kegiatan ST03

Th 2001	Pilot studi / uji coba
Th 2002	Pilot ST03, Gladi Bersih, Updating Sketsa Peta, Pencacahan ST03-Podes, Updating DPP
Th 2003	Listing, PES, Pengolahan hasil listing
Th 2004	Pengolahan lanjutan dan analisis hasil listing, Pencacahan sampel sub-sektor, Pengolahan sub-sektor
Th 2005	Pencacahan Survei Non Usaha Pertanian, Pencacahan SSPP

4. Jadwal Kegiatan 2003

Pelatihan Innas ST03	20 – 31 Mei 2003
Pelatihan Inda ST03	16 – 30 Juni 2003
Pelatihan petugas ST03	15 – 31 Juli 2003
Pendaftaran rumah tangga	1 – 31 Agustus 2003
Pelatihan Innas Pengolahan	1 – 15 Juli 2003
Pelatihan petugas pengolahan	16 – 31 Juli 2003
Angka sementara	1 – 15 Desember 2003
PES ST03	16 Sep – 15 Okt 2003

5. Metodologi Listing

Kategori Desa/Kel.	Letak Geografis	Strata Desa/Kel.	Metode
Perkotaan	Pantai		Sensus Lengkap
	Bukan Pantai	Konsentrasi Usaha Pertanian	Sensus Lengkap
		Tidak konsentrasi usaha Pertanian	Sensus Sampel
Pedesaan			Sensus Lengkap

- ♦ Listing dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia. Penggolongan daerah pantai dan bukan pantai didasarkan pada data SP2000-Podes, penggolongan wilayah konsentrasi dan tidak konsentrasi pertanian didasarkan pada data hasil SP2000-L2
- ♦ Blok sensus yang dilisting hanyalah blok sensus-blok sensus biasa. Blok sensus khusus dan persiapan tidak dicacah. Wilayah administrasi yang dicakup dalam ST03 adalah wilayah administrasi yang terbentuk sampai dengan Nopember 2002.
- ♦ Metode pemilihan blok sensus adalah metode pemilihan sampel satu tahap. Daftar sampel blok sensus akan dimuat dalam daftar ST03-DSBS yang akan dikirimkan ke daerah pada bulan Mei 2003.

6. Petugas

Petugas yang terlibat dalam listing ST03:

- ♦ Instruktur Nasional (Innas).
- ♦ Instruktur Daerah (Inda).
- ♦ KSK /PKSK
- ♦ PML
- ♦ PCL

Pelatihan petugas ST03 akan diintegrasikan dengan pelatihan survei garam yodium.

7. Jenis Dokumen

- ♦ Daftar ST03-L1
- ♦ Daftar ST03-L2
- ♦ Daftar ST03-KBL2
- ♦ Daftar ST03-LKOC
- ♦ Daftar ST03-SWB
- ♦ Daftar Kode Jenis Tanaman, Ternak dan Unggas
- ♦ Stiker ST03

8. Pengolahan Dokumen

- ♦ Hasil pengolahan listing ST03 akan dipublikasikan dalam 2 versi: angka sementara dan angka final. Angka sementara diperoleh dari hasil pengolahan Daftar ST03-LKOC, sedangkan angka final diperoleh dari hasil pengolahan Daftar ST03-L2 dan ST03-KBL2.
- ♦ Daftar ST03-LKOC diolah dengan data entry yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten/Kota. Hasil pengolahan angka sementara ini harus sudah siap awal Desember 2003
- ♦ Daftar ST03-L2 dan ST03-KBL2 diolah dengan scanner dan pengolahan dilaksanakan di pusat-pusat pengolahan yang sudah ditentukan. Hasil pengolahan harus sudah selesai pada akhir Maret 2004.

9. Jenis Penerangan ST03

- ♦ Stiker ST03
- ♦ Leaflet ST03
- ♦ Poster ST03
- ♦ Spanduk ST03
- ♦ Radio Spot ST03
- ♦ Majalah Udara
- ♦ Sandiwara Udara
- ♦ Filler (TV commercial)
- ♦ Talk Show
- ♦ Diskusi interaktif
- ♦ Wawancara
- ♦ Kuis interaktif

10. Permasalahan

- ♦ Kemungkinan ada perbedaan antara jumlah wilayah administrasi yang dicakup dalam ST03 dengan keadaan di lapangan
- ♦ Penentuan daerah perkotaan-pedesaan, pantai-bukan pantai, konsentrasi-tidak konsentrasi, dilakukan oleh BPS Pusat. Pengklasifikasian ini kemungkinan berbeda dengan keadaan di daerah.
- ♦ Pelatihan petugas ST03 diintegrasikan dengan pelatihan petugas survei garam yodium. Karena sumber pembiayaannya berbeda. BPS daerah harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan administrasinya.
- ♦ Kegiatan pengolahan dokumen ST03-L2 dan ST03-KBL2 kemungkinan besar akan overlap dengan kegiatan pengolahan P4B. Untuk itu BPS Daerah harus melakukan rencana pengolahan seleliti mungkin dengan memperhitungkan mesin scanner dan SDM yang ada

DIREKTORAT STATISTIK PERTANIAN

STATISTIK TANAMAN PANGAN

PENDELEGASIAN PENGOLAHAN

Tujuan mengurangi permasalahan klasik :

- Keterlambatan pengiriman dokumen
- Perbedaan angka daerah dengan pusat.

Hasil pengolahan BPS Propinsi dapat digunakan bila memenuhi ketentuan berikut:

- ❖ Angka merupakan hasil pengolahan dengan SIMPP, sesuai dengan yang dikirimkan ke pusat.
- ❖ Pengiriman raw data ke pusat dilakukan secara berkala setiap akhir bulan.
- ❖ Pengiriman raw data paling lambat 10 hari sebelumnya dan harus sudah lengkap (SP-IA/B, Ubinan, SP-IV, dan SP-VA) dengan estimasi untuk dokumen tidak masuk (SP-IA/B dan SP-VA).

STATISTIK TANAMAN PANGAN

RAKER Pembahasan Angka Ramalan

- Dilaksanakan oleh Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian
- BPS Propinsi yang diundang, tergantung urgensi dan biaya yang tersedia
- Sebelum raker biasanya menurunkan tim statistik ke propinsi untuk antisipasi kelengkapan laporan yang akan berakibat pada angka ramalan
- Permasalahan daerah yang ada harus dipecahkan sesuai kondisi lapangan dan koreksi harus dilakukan pada raw data SIMPP. Koreksi tidak dibenarkan hanya pada form ramalan.
- Diharapkan setelah raker ramalan, angka sudah tidak berubah lagi.

STATISTIK TANAMAN PANGAN

LAIN-LAIN

- ❖ Pada pembahasan Ramalan III, BPS Propinsi harus membawa/mengirimkan angka tetap produksi padi dan palawija per kabupaten..
- ❖ Direncanakan penetapan Angka Tetap dimajukan pada bulan April.
- ❖ Diusulkan untuk mengganti subround dengan triwulan.
- ❖ Untuk propinsi yg sudah melaksanakan refreshing, pengisian daftar I (listing ubinan) lebih baik.
- ❖ Buku pedoman untuk BPS propinsi yang tidak ikut refreshing sedang dicarikan jalan keluarnya.

STATISTIK HORTIKULTURA

I. SURVEI PERTANIAN

A. Daftar SP II dan SP III

1. Pelaksanaan daftar SP yang disempurnakan mulai Januari 2003.
2. Sebagai kelanjutan refreshing 2002 tahun 2003 akan dilaksanakan refreshing di 6 propinsi (Sumbar, Sumsel, Jambi, Bali, NTB, Kalbar)
3. PUSDATIN, Deptan dan Disprop akan melakukan penyandang data refresh, sebagai 10

STATISTIK HORTIKULTURA

I. SURVEI PERTANIAN

B. Pengolahan Daftar SP II dan SP III

1. Sejak tahun 1995 pengolahan data hortikultura komputerisasi dengan menggunakan
2. Pada tahun 1995 pengolahan data hortikultura komputerisasi dengan menggunakan

STATISTIK HORTIKULTURA

I. SURVEI PERTANIAN

B. Pengolahan Daftar SP II dan SP III

3. Propinsi yang melakukan pengolahan dengan

SIMHORTI:

• SULBEHSP-INA & SP-III tahun 2002

• RIALL (SP-III & SP-III tahun 2002)

5. SIMHORTI untuk daftar SP yang akan diadakan di propinsi.

STATISTIK HORTIKULTURA

II. Survei Perusahaan Hortikultura

1. Daftar nama dan alamat untuk survei tahun 2002 berdasarkan hasil update dari SP-STG dan hasil dari perusahaan tahun 2002.
2. Daftar isian yang sudah di BPS dan hasil dari perusahaan tahun 2002.
3. Isian daftar yang sudah di BPS dan hasil dari perusahaan tahun 2002.

Evaluasi Kegiatan Tahun 2002 Statistik Perkebunan & Kehutanan

1. Tingkat Pemenuhan Dokumen

Jenis Dokumen	Target	Realisasi	%
1. PB2001-Kelapa sawit	888	300	43.60
2. PB2001-Teh	145	78	53.79
3. LTHP-11-2001	456	139	30.48
4. LTHP-12-2001	411	52	12.65
5. LTSEWA-2001	258	96	37.21
6. OPR-RA 2002	2316	1407	60.75

• Revisi survei perusahaan perkebunan bulanan biasanya belum sebagaimana yang diharapkan, kemungkinan disebabkan belum adanya sistem pelaporan revisi yang jelas.

Rencana Kegiatan Tahun 2003 Statistik Perkebunan & Kehutanan

1. Penambahan cakupan survei perusahaan perkebunan tahunan

- Tahun 2002: 2 (dua) jenis komoditi yaitu kelapa sawit (888 perusahaan) dan teh (145 perusahaan).
- Tahun 2003: 5 (lima) jenis komoditi yaitu kelapa sawit (714 perusahaan), teh (144 perusahaan), kakao (224 perusahaan), kopi (105 perusahaan) dan kina (16 perusahaan).

Rencana Kegiatan Tahun 2003 Statistik Perkebunan & Kehutanan

1. Revisi survei perusahaan perkebunan bulanan

Jadwal Kegiatan

Revisi Perusahaan Perkebunan bulanan Tahun 2003

Tahap	Periode Bulan Laporan (Revisi)	Pengiriman Dok & Direktori dari BPS Pusat	Pelaksanaan Revisi	Laporan Revisi Daerah
I	Jan-Apr 2003	Mei 2003	Jan 2003	Juli 2003
II	Mei-Agt 2003	Sep 2003	Ok 2003	Nop 2003
III	Sep-Des 2003	Jan 2004	Feb 2004	Mar 2004

Rencana Kegiatan Tahun 2003 Statistik Perkebunan & Kehutanan

1. Perubahan Cakupan survei perusahaan kehutanan

- Tahun 2002: Survei Perusahaan Penangkaran Satwa Liar dan Wisata Alam (LT-SLWA)
- Tahun 2003: Survei Perusahaan Penangkaran Satwa dan tumbuhan Liar (VT-STL)

STATISTIK PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pengumpulan Data

Permasalahan :

1. Penerimaan dokumen terlambat
2. Jumlah lembar dokumen yang dikirim propinsi berbeda dengan yang diterima BPS
3. Jumlah KEURMASTER > dari jumlah Kecamatan karena Keurmaster dianggap iderik pencatat pemotongan ternak di desa
4. Satu TPI mempunyai nama lebih dari 1
5. Laporan TPI triwulanan berbeda dengan laporan tahunan

STATISTIK PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pengumpulan Data

Pemecahan :

1. Meningkatkan komunikasi antara Pusat dan Daerah
2. Mengefektifkan pengawasan lapangan
3. Penyebaran petugas pengumpul data
4. Pemberian reward dan punishment kepada petugas

STATISTIK PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pengolahan Data

Permasalahan :

1. Sebagian isian dokumen kosong
2. Isian dokumen meragukan seperti
 - angka persis sama dengan periode sebelumnya
 - isian pengeluaran lebih besar dari pendapatan

STATISTIK PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pengolahan Data

Pemecahan :

1. Peningkatan pemeriksaan dokumen (kelengkapan dan kelayakan isian) oleh daerah
2. Isian yang kosong diperkirakan berdasarkan harga terdapat dari produksi dan sarana produksi
3. Dirampatkan pengolahan akan didesentralisir di BPS Propinsi

STATISTIK PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Penyajian Data

Publikasi:

1. Penerbitan di Pusat mengalami kelambatan
2. Semakin banyak BPS Propinsi yang mengeluarkan publikasi Stat. Peternakan & Perikanan
3. Publikasi hanya berisi tabel
4. Agar publikasi menarik, diusulkan dilengkapi dengan sajian tekstual dan dikaitkan dengan data konsumsi (daging dan ikan)

STATISTIK PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pengembangan & Pemanfaatan Data

a. Cakupan Data yang Terbatas :

1. Data Produksi TPI hanya ikan laut
2. Usaha rumah tangga tidak disurvei rutin
3. Data BPS (jumlah ternak) < data Dinas/Ditjen Peternakan

STATISTIK PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pengembangan & Pemanfaatan Data

- b. Arah Tindakan Pemecahan Masalah & Pengembangan :
1. Meningkatkan cakupan perusahaan ternak/ikan
 2. Meningkatkan kerjasama BPS daerah dengan Dinas Peternakan/Perikanan
 3. Menjadikan survey petak sampel sebagai salah satu yang dikaji dalam IT dan untuk penyusunan RPT/Kardinas
 4. Mengoptimalkan Sistem Statistik Daerah untuk Peternakan dan Perikanan secara nasional